

Relasi Kuasa dalam Perubahan Kurikulum 2013

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2017, 6(1): 1-15

Fisca Fitri Cahyani¹, Moh. Mudzakkir²

Abstract

The most visible and most easily explained power is in the state aspect. This is illustrated clearly from the contents of the Constitution which became the benchmark or the basis of every decision made. The polemic started from the SBY administration which created a policy on the new curriculum, which was later named the Curriculum 2013. This curriculum is intended for young generation able to meet the competition MEA. But after the government changed hands and made a new policy (policy on curriculum evaluation and finally implemented two curriculum) some writings were twisted. The implementation of government policies and criticisms that are carried out as a form of resistance are never separated from the ideologies that lie behind them. This research uses content analysis as data analysis technique. The salin to sharpen analysts also used the theory of Liberal Paradigm of Girox and the Power of Curriculum Michel W. Apple. From the research conducted found that the background of M Noah and Boediono which including the technocrats led to decisions that are very hegemonic. Meanwhile, criticism made by some parties is very nationalist or berparadigma of critical education. This is because they are back to the romanticism of making the Constitution which should be used as the basis for further policy making. In addition, the illusions of educational perfection raised by the predecessor from Indonesia (Ki Hadjar Dewantara) also did not escape as the basis.

Keywords: Curriculum Changes, Curriculum 2013, Ideology.

¹ Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret

² Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya

Email: fiscafitri@gmail.com

Abstrak

Hal yang paling terlihat dan paling mudah untuk dijelaskan mengenai kekuasaan adalah dalam aspek negara. Ini digambarkan secara jelas dari konteks konstitusi yang menjadi cabang atau dasar dari setiap pembuatan keputusan Masalah dimulai dari pemerintahan SBY yang membuat kebijakan pembuatan kurikulum baru, yang setelahnya dinamai dengan Kurikulum 2013. Kurikulum ini dimaksudkan untuk generasi muda agar dapat bersaing di era MEA. Namun setelah pemerintah berpindah tangan dan membuat kebijakan baru (kebijakan dalam evaluasi kurikulum dan akhirnya mengimplementasi dua jenis kurikulum) beberapa aturan didalamnya tumpang tindih. Implementasi dari kebijakan pemerintah dan kritikan yang dilakukan sebagai bentuk resistensi tidak pernah terpisah dari ideologi yang berada dibalik mereka. Penelitian ini menggunakan konten analisis sebagai teknik analisis data. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini juga menggunakan teori paradigma liberal dari Girox dan kekuatan kurikulum dari Michel W. Apple. Dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa latar belakang dari M. Noh dan Boediono yang melibatkan teknokrat menyebabkan keputusan yang dihasilkan sangat bersifat hegemonik. Sementara, kirikan yang dibuat oleh beberapa pihak sangat bersifat nasionalis atau berparadigma dari pendidikan kritis. Hal ini disebabkan karena mereka kembali kepada romantisme dalam membuat konstitusi yang seharusnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan dikemudian hari. Sebagai tambahan, ilusi dari kesempurnaan pendidikan yang diciptakan oleh pendahulu dari Indonesia (Ki Hadjar Dewantara) juga tidak lepas dari dasar ini.

Kata Kunci: Perubahan Kurikulum, Kurikulum 2013, Ideologi.

PENDAHULUAN

Kekuasaan yang paling nampak dan yang paling mudah dijelaskan adalah dalam aspek kenegaraan. Ini tergambar jelas dari isi Undang-Undang Dasar yang menjadi patokan atau dasar dari setiap keputusan yang dibuat. Agar dapat dipastikan berjalan dengan lancar, peraturan yang dibuat juga memiliki konsekuensi hukuman jika dilanggar. Negara pun memiliki kewenangan untuk menentukan sistem politik yang dianutnya. Indonesia sebagai bangsa yang sedang membangun, memilih sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem politik. Dikatakan demikian karena sebenarnya demokrasi tergantung pula pada peningkatan perkapita suatu negara. Pada gilirannya, perekonomian menjadi teman hidup yang dapat memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, menurut Boediono (dalam Rorum Mangunwijaya VII, 2013: 4), dengan kata lain harus ada sinergi yang benar-benar kuat antara politik dan ekonomi. Namun demikian peran pendidikan menjadi sangat penting di sini. Ini karena dalam proses perwujudan demokrasi secara substansial, diperlukan manusia-manusia yang mampu melaksanakan dan memperkuat institusi-institusi yang bersangkutan. Selain itu, pendidikan juga dirasa harus mampu memberi bekal kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan suatu institusi. Sehingga diperlukan pola pendidikan yang baik (Wulandari, dkk., 2018, Indawatik, dkk., 2018). Namun kekuasaan negara pun tidak jarang hanya dijadikan sebagai “atas nama” untuk kepentingan beberapa pihak. Tidak hanya dalam konteks ekonomi, budaya, atau bahkan politik, praktik ini juga terjadi didalam tubuh pendidikan Indonesia. Contoh kecilnya saja, saking seringnya “menyempurnakan” kurikulum hingga muncul istilah *Ganti Menteri Ganti Kurikulum* atau jika dihindak dikatakan dengan bahasa yang lebih halus adalah *Ganti Pemerintahan Ganti Kebijakan*. Pada dasarnya, pendidikan merupakan faktor yang paling mengakar jika berbicara mengenai perkembangan suatu bangsa. Tidak hanya di Indonesia, seantero jagat pun memiliki argumentasi yang serupa jika ditanya mengenai pembangunan bangsanya. Sifatnya yang krusial, membuat pendidikan harus terus bertransformasi menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, tubuh pendidikan harus dibuat sefleksibel mungkin,

selentur mungkin, untuk dapat berjalan beriringan dengan perkembangan manusia. Bisa dikatakan masih banyak aspek-aspek yang masih setengah matang dalam pendidikan Indonesia saat ini. Mulai dari aspek tenaga pendidiknya, infrastrukturnya, sarana dan prasaranya, hingga yang sedang masa gojang-ganjing sekarang adalah kurikulumnya. Oleh karena itu menjadi sangat naif jika tidak mengatakan pendidikan Indonesia masih sangat ranum untuk disebut “*fix*”. Untuk itu, kebijakan demi kebijakan terus digulirkan oleh negara untuk mematangkan sistem pendidikan.

Namun entah mengapa, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah lebih sering melewati carut marut yang sudah jelas ada didepan mata. Masalah yang paling rawan menurut Illich adalah sekolah menjadi sebuah pasar tenaga kerja yang paling cepat tumbuh (Freire dkk, 2009: 545). Selain itu, perbaikan infrastruktur yang sudah tidak layak, politisasi jabatan kepala sekolah, koherensi dasar keahlian guru dengan mata pelajaran yang diampu, hingga mutasiguru yang dilakukan semena-mena oleh pemerintah daerah juga perlu diperhatikan. Pemerintah lebih senang mengotak-atik kurikulum yang sebenarnya bisa dikatakan bukan masalah yang *urgen* untuk dipecahkan. Pada dasarnya kurikulum menjadi salah satu materi yang tidak dapat dipisahkan jika membahas tentang pendidikan (terutama pendidikan formal). Ini karena kurikulum adalah kerangka yang kemudian ditindaklanjuti oleh proses belajar mengajar. Belum lagi masalah-masalah diatas diselesaikan, pendidikan Indonesia kini diterpa oleh masalah yang baru. Diakhir masa jabatannya Nuh selaku menteri pendidikan merancang sistem kurikulum baru untuk pendidikan Indonesia. Kurikulum tersebut diberi nama Kurikulum 2013. Kemunculan kurikulum ini pun diikuti oleh munculnya pro dan kontra. Bukan hanya secara substansial namun pada saat pelaksanaan. Secara susbstansial, kurikulum ini dinilai terlalu memberatkan peserta didik karena peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu mereka di sekolah. Hal ini disebabkan oleh makin padatnya jam pelajaran setiap harinya, meskipun beberapa mata pelajaran sudah dihapuskan. Dalam hal waktu, banyak yang menilai waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Kurikulum ini dirasa seperti proyek yang kejar tayang karena sang pemilik hendak pensiun. Selain itu banyak pula yang menyebut kurikulum ini sebagai kurikulum instan.

Menanggapi hal ini, seperti yang dilansir dari sindonews.com 16 maret 2013 Nuh berkata bahwa sebenarnya kurikulum ini sudah lama dipikirkan namun baru bisa direalisasikan. Dengan demikian kurikulum ini tidak bisa dikatakan sebagai kurikulum instan. Nuh juga menganalogikan perubahan kurikulum ini seperti bahtera atau perahu Nabi Nuh. Menurutnya jika kurikulum segeradiganti, maka sistem pendidikan pun segera dapat terselamatkan. Secara substansial, ada yang menganggap kurikulum ini adalah kurikulum yang bias masyarakat kota desa. Ini karena kurikulum 2013 menghilangkan mata pelajaran TIK. Argumentasinya adalah pelajaran TIK dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang berasal dari desa untuk memahami kecanggihan teknologi. Hal ini tentu berbeda dengan anak-anak yang berada di kota. Dengan fasilitas yang memadai, anak-anak kota bisa saja memahami teknologi tanpa harus bersusah payah mengikuti mata pelajaran TIK. Efek yang ditimbulkan dari bias ini adalah pendidikan semakin mengasingkan salah satu masyarakat karena ia miskin dan ia tidak akan mendapat keuntungan (Illich dkk, 2013: 13).

Masih terkait dengan perampangan mata pelajaran yang dituntut oleh kurikulum 2013, ditakutkan nantinya akan timbul hiruk pikuk lanjutan oleh guru-guru, akan banyak pertanyaan yang muncul mengenai status guru yang mata pelajarannya dibuang. Ada pula kemungkinan guru menyalahi ketentuan professional yang mensyaratkan guru untuk mengajar sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Belum lagi masalah substansial itu selesai dibahas, perhatian masyarakat tertuju pada pelaksanaan kurikulum yang *amburadul*. Mulai dari pendistribusian buku yang lamban hingga makin lamanya waktu anak berada di sekolah. Ada yang menganggap bahwa ini dapat menjadikan anak mudah bosan berada di sekolah dan bosan pula mengikuti proses belajar. Meskipun banyak yang mengkritik penerapannya, ada pula pihak yang setuju dengan penerapan kurikulum ini. Ada yang menganggap kurikulum 2013 adalah kurikulum yang banyak memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dan mampu mempersiapkan generasi yang siap menghadapi kehidupan abad 21. Selain itu kurikulum ini dinilai dapat pula digunakan sebagai media untuk mengejar ketertinggalan masyarakat Indonesia di mata dunia. Sekali tiga uang, kurikulum 2013 juga bisa digunakan sebagai ajang pembentukan karakter dengan cara yang

sederhana. Seperti dengan mewajibkan kegiatan pramuka di tiap-tiap sekolah. Setelah secara marathon menerapkan kurikulum yang dinamai sebagai kurikulum instan, Anis Baswedan selaku menteri pendidikan saat ini mengeluarkan peraturan baru melalui Permendiknas No 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Peraturan ini dikeluarkan karena penerapan kurikulum 2013 yang sangat instan dan masih memerlukan uji coba lanjutan. Lebih rinci, dilansir dari CCN Indonesia (2014) (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218055425-20-18957/menteri-anies-keluarkan-peraturan-kurikulum-2013/>), pada pasal dua menyebutkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Pro dan kontra yang dilakukan oleh masyarakat diutarakan dalam sebuah media, baik dalam media cetak maupun dalam media elektronik seperti televisi. Kehadiran media memiliki poin positif juga negatif dalam kehidupan manusia. Dampak negatifnya, media dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang tertentu untuk mendongkrak popularitas atau tujuan lain. Seperti yang sering dilakukan oleh artis atau bahkan politisi. Media ini dijadikan sebagai arena untuk membangun citra. Sebagai contoh politisi dapat melakukan kampanye dan seolah-olah menunjukkan bahwa ia dan partainya adalah pro rakyat miskin. Meskipun demikian, media juga memiliki poin positif. Salah satunya adalah media dapat digunakan sebagai arena diskusi (baik secara intelektual maupun melalui celetukan-celetukan, secara lisan atau tulisan). Seperti pada rubrik opini dalam surat kabar hingga dialog interaktif yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi swasta. Opini-opini yang dicantumkan atau yang dilontarkan dianggap sebagai perwakilan dari suara masyarakat secara luas.

Dari pemaparan latar belakang diatas, sangat terlihat kekuasaan sebenarnya bersifat luas dan tidak hanya terbatas dalam tatanan pemerintahan atau antara relasi pemilik modal dan pekerja. Ada cara lain yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan ideologi. Oleh karena itu rumusan masalah yang hendak dicapai adalah “Bagaimana polemik perubahan kurikulum yang terjadi dalam media sosial?”. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran rekonstruksi polemik perubahan kurikulum 2013.

Secara khusus akan membahas mengenai: 1) Pro-kontra yang terjadi dalam media massa, Aktor yang memproduksi wacana; 2) Ideologi yang digunakan dari setiap wacana yang dikeluarkan; 3) Memetakan pihak mana yang menjadi kelompok pro, kontra, atau malah ada pihak yang seolah-oleh menjadi mediator. Seperti yang telah dijelaskan diatas, memang ketika berbicara mengenai kekuasaan dirasa sangat sempit jika hanya melihatnya dari relasi pemilik modal dan pekerja, tuan tanah dan buruh tani, pemilik alat produksi dan buruh. Ini karena kekuasaan bersifat abstrak. Maksudnya adalah ketika suatu ideologi dipegang teguh dan pengetahuan yang dimiliki lebih dari pada yang lain, dirasa kekuasaan akan tetap muncul. Meskipun dalam kelompok yang sangat kecil sekalipun. Lebih fokus lagi, relasi kuasa yang berbeda juga diutarakan oleh Michael Apple. Konsep utama dari Michael W. Apple adalah mengenai kekuasaan dan ketidakadilan yang tercermin dalam kurikulum. Kurikulum merupakan arena pertarungan ideologi dalam konteks pendidikan. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, pengetahuan yang diajarkan dalam pendidikan menunjukkan bagaimana kelas dominan memelihara dan melegitimasi kekuasaan dari perankurikulum (Arif, 2014: 37). Sebagai contoh, mengkategorikan sekolah favorit dan yang tidak favorit, kemudian memberikan akses yang berbeda untuk dapat masuk hingga lulus dari sekolah yang tergolong favorit.

Menurut Apple, sekolah tidak menunjukkan kekuasaan yang progresif tapi malah menggunakan sistem ekonomi dan budaya (Hidayat, 2013: 123). Dalam hal ini ideologi pihak dominan benar-benar dipertahankan. Pihak dominan menggunakan budaya populer untuk menunjukkan identitas kelasnya. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pendidikan adalah sarana pelanggeng *status quo* bagi kelas dominan. Dalam bahasa Gramsci, ideologi-ideologi itu masuk melalui suatu sistem yang disebut sebagai hegemoni. Ini muncul karena ada ruang material dan saluran pendapatan. Maksudnya adalah pemilik modal untuk mempengaruhi buruh agar tetap mau bekerja dengannya, contohnya saja dengan perkataan yang dilakukan berulang-ulang. Pandangan mengenai hegemoni ini sebenarnya merupakan jawaban dari pertanyaan Marx tentang mengapa revolusi tidak segera terjadi pada masyarakat saat itu (Hidayat, 2013: 127). Selain itu sekolah sebagai satu lembaga pendidikan kadang-kadang malah

menciptakan persaingan dan ketegangan antara fungsi ideologis ekonomi karena sekolah tidak hanya merespon kebutuhan modal, tetapi juga harus menjaga legitimasi untuk kelompok lain (Hidayat, 2013: 130). Tidak hanya itu, beberapa sekolah pun dinilai surplus menciptakan tenaga kerja. Pendidikan juga dirasa semakin kuat diletakkan dalam sebuah dikotomi. Di satu sisi pihak dominan merasa bahwa pendidikan dan kebijakan-kebijakannya sudah melakukan internalisasi nilai individual yang baik. Ini dapat dilihat adanya nilai kompetisi yang kuat yang selalu ditanamkan dalam ranah pendidikan. Dalam konteks pendidikan Indonesia munculnya ranking hingga standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran menjadikan anak untuk terbiasa bekerja keras.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*) merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun nonverbal. Se jauh ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

Sebenarnya analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur manusia. Namun, penggunaan teknik ini diintroduksikan di bawah nama analisis isi (*content analysis*) dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan istilah tersebut. Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehidupan manusia terjadi karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis makna komunikasi yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti Bernard Berelson (1959). Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi. Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang tampak dalam komunikasi. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari semiotik, analisis wacana, dan framing. Ketiga analisis tersebut adalah terletak pada titik fokus yang hendak dikaji. Oleh karena itu peneliti memilih

menggunakan analisis isi untuk mengkaji tentang komunikasi yang terjadi dalam suatu fenomena yang dikembangkan oleh media. Dari analisis isi ini nantinya akan dapat terlihat pokok perdebatan yang terjadi dari masing-masing rezim. Teknik analisis isi (*content analysis*), menurut Holsti (dalam Permatasari, 2008: 89) analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khususnya suatu pesan secara objektif dan sistematis. Teknik analisis ini sangat erat hubungannya dengan komunikasi dan analisis komunikasi. Langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan untuk menggunakan teknik analisis isi kualitatif adalah pertama, peneliti harus dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin dicapai. Kedua, memilih unit analisis yang akan diuji. Jika penelitian berhubungan dengan data pesan dalam media, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantar pesan. Sumber penelitian yang disasar adalah Harian Kompas sejak Oktober 2012 hingga Februari 2015. Subjek ini dipilih karena Kompas dinilai sebagai surat kabar yang memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi Kompas mengikuti perkembangan wacana pendidikan yang terjadi. Pemwacanaan ini dapat dilihat dari rubrik opini dan *education news* yang telah disediakan. Berita yang diambil pun tentunya tidak setiap hari dalam kurun dua tahun tersebut. Melainkan hanya pada tanggal-tanggal yang menyertakan tulisan mengenai perubahan Kurikulum 2013 saja. Mengingat wacana dibentuk tidak hanya melalui satu media, maka pembekoran wacana yang dilakukan pun dibantu dengan media massa yang lain, seperti CNN, Metrotvnews.Com, Liputan6.Com, dan masih banyak lagi yang lain. Ini dilakukan dengan cara membelah subjek-subjek yang memproduksi wacana berdasarkan diskursusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat kebijakan perubahan kurikulum menjadi marak, tongkat masa depan pendidikan Indonesia berada ditangan Nuh. Ada yang menganggap perubahan ini terlalu mengada-ada, ada pula yang menganggap kebijakan ini terlalu terlalu instan. Namun hal ini ditepis oleh Nuh. seperti yang dilansir oleh rubrik opini dalam Kompas.Com, Nuh mengatakan bahwa sebenarnya

kurikulum yang diimplementasikan saat itu sudah dipikirkan secara matang dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu pada tahun 2006 namun anehnya kenapa harus saat beliau akan habis masa jabatan baru diimplementasikan.

Hal inilah yang menimbulkan banyak perbincangan, kajian mendalam, hingga sindiran sinis mengenai kebijakan pergantian kurikulum tersebut. Dari data yang diperoleh, ditemukan perubahan pandangan terhadap pemerintah. Pada masa pemerintahan Menteri M. Nuh cibiran terus bermunculan. Sedangkan pada pertengahan tahun 2014, Menteri Pendidikan diambil alih oleh Anies Baswedan. Pada pemerintahan yang baru ini, publik seperti diberi angin segar karena Anies segera melakukan evaluasi terhadap kurikulum 2013. Alhasil, menurut hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah wajib melakukan evaluasi. Hal yang kemudian ditempuh oleh Anies adalah pemberlakuan dua kurikulum sekaligus. Secara rinci pernyataannya dilansir dalam MetroTVNews.Com. Anies berpendapat bahwa pemberhentian kurikulum hanya diperuntukkan bagi sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama kurang dari tiga semester dan kembali pada menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester diperbolehkan untuk melanjutkan kurikulum yang ada. Dalam hal ini banyak tulisan atau opini yang seakan berbalik arah. Dikatakan demikian karena dapat dilihat pada saat masa pemerintahan Nuh opini yang ditulis oleh penulis cenderung bernada kontra dan berada pada Wacana Tandingan (*Counter Discourse*). Sedangkan setelah keputusan baru dibuat oleh Anies nada tulisan mereka cenderung berubah menjadi relatif atau memberi masukan kepada pemerintah untuk evaluasi. Jika dilihat lagi dalam tulisan-tulisan mereka, kedudukan ini berubah tidak secara eksplisit. Penulis tidak serta merta memandang kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies sebagai kebijakan yang baik. Penulis lebih cenderung memberikan masukan sehingga kedudukan tulisannya pada masa Pemerintahan Anies berada pada wacana relatif.

Perubahan perspektif atau pandangan tidak lepas dari organisasi yang menaungi. Ada kesamaan pola pikir yang membuat suatu organisasi terbentuk. Organisasi yang pada dasarnya kontra terhadap pemerintah tentunya terbentuk dari orang-orang yang kontra terhadap kebijakan atau

pada rezim Jokowi ada istilah prorakyat miskin, prorakyat kecil, dan lain sebagainya. Organisasi atau kedudukan yang dapat dikategorikan sebagai pro pemerintah. Tidak banyak memang yang menuliskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah Nuh namun tetap ada beberapa yang melakukan itu. Seperti yang dilakukan oleh Anita Lie. Pada masa pemerintahan Nuh ia merupakan anggota atau tim pelaksanaan Kurikulum 2013. Tidak heran jika dalam dua tulisannya ia cenderung membela pelaksanaan Kurikulum 2013.

Ini tentu berbeda dengan Retno Listyarti, Muhammad Abduhzen, Ki Supriyoko, dan Doni Koesoema. Pada dasarnya mereka berasal dari organisasi yang berbeda, namun mereka sama-sama menentang perubahan kurikulum yang dilakukan oleh Nuh. Seperti Retno Listyarti. Latar belakangnya yang merupakan sekjen FGSi membuat tulisannya cenderung mengutarakan kekurangan Kurikulum 2013 dari kaca mata seorang guru. Artinya, dalam penerapan Kurikulum 2013 dianggap sebagai penghambat kinerja guru. Ini karena guru menjadi memiliki beban berlebih dan proses mengajarnya cenderung terganggu.

Lain Retno, lain pula Abduhzen latar belakangnya sebagai seorang anggota PGRI memandang pendidikan yang sangat pedagogis. Tulisan-tulisannya tidak pernah luput dari hakikat pendidikan yang semestinya. Ia banyak mengkritik perubahan kurikulum baik secara hakikat maupun pelaksanaan. Menurutnya kurikulum yang diterapkan saat itu sangat carut marut terlebih ia menyatakan pula ada permainan politik dalam pengadaan buku pelajaran. Namun ketika kementerian pendidikan berada ditangan Anies arah tulisan Abduhzen menjadi berbeda, yaitu berada pada jalur wacana relatif. Ini bukan merupakan suatu yang aneh jika melihat latar belakang Abduhzen yang merupakan seorang dosen di Universitas Paramadina yang mana sebelum menjadi menteri, Anies adalah seorang Rektor di Universitas tersebut. Mungkin karena memang Abduhzen setuju dengan jalan yang diambil Anies atau mungkin juga sebagai bentuk solidaritas.

Tulisan lain yang menarik perhatian pembaca adalah tulisan milik Ki Supriyoko. Latar belakangnya yang menjadi pengurus dari organisasi-organisasi Tamansiswa membuat tulisannya tidak lepas dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dua tulisannya dikeluarkan pada masa pemerintahan yang berbeda. Pada masa pemerintahan Nuh ia banyak

mengkritik kebijakan Nuh dan menganggap kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hakikat pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Namun ketika masa jabatan Anies ia memang tidak sempat mengatakan bahwa ia mendukung keputusan tersebut namun ia seakan mengiyakan pidato yang dilakukan Jokowi saat berkunjung di Taman Siswa. Ia berharap agar Anies selaku menteri pendidikan memperhatikan dan mempertimbangkan pidato yang disampaikan oleh Jokowi tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas didapati bahwa polemik yang terjadi terbagi dalam dua rezim pemerintahan yaitu masa pemerintahan SBY periode dua dan masa pemerintahan Jokowi. Polemik berawal dari masa pemerintahan SBY yang membuat kebijakan mengenai kurikulum baru, yang selanjutnya dinamai Kurikulum 2013. Kurikulum ini dimaksudkan agar generasi muda mampu memenuhi persaingan MEA. Banyak penulis yang melakukan kritikan terhadap penerapan kurikulum baru (Kurikulum 2013). Para penulis mengkritik mulai dari waktu yang terlalu cepat hingga pelaksanaan yang kacau. Pada dasarnya kritik yang diutarakan berdasarkan hakikat pendidikan yang dinilai kurang sesuai dengan apa yang seharusnya. Meskipun ada pula yang setuju dengan kurikulum tersebut dan beranggapan bahwa Kurikulum 2013 adalah wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi persaingan global.

Namun setelah pemerintahan berganti tangan dan dibuatnya kebijakan baru (kebijakan tentang evaluasi kurikulum dan akhirnya menerapkan dua kurikulum) beberapa tulisan pun berputarbalik. Beberapa penulis, seperti Mohammad Abduhzen, Doni Koesoema, dan Ki Supriyoko yang awalnya menjadi wacana tandingan bagi kebijakan SBY kini berubah menjadi wacana relatif. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang mereka yang merupakan satu alamater dengan Anies, anggota PGRI, dan pemerhati pendidikan.

Penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan kritik yang dilakukan sebagai bentuk dari perlawanan tidak pernah lepas dari ideologi-ideologi yang melatarbelaknginya. Latar belakang M Nuh dan Boediono

yang termasuk kaum teknokrat menyebabkan keputusan-keputusan yang sangat hegemonik. Sementara itu kritik yang dilakukan oleh beberapa pihak sangat nasionalis. Ini karena mereka kembali pada romantisme pembuatan UUD yang seharusnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan. Selain itu angan-angan kesempurnaan pendidikan yang kemukakan oleh pendahulu asal Indonesia (Ki Hadjar Dewantara) juga tidak luput dijadikan dasar.

Jika dipahami secara mendalam, pada dasarnya secara filosofi penerapan Kurikulum 2013 ini mengikuti cita-cita pendidikan kritis atau Freireian. Artinya pendidikan harus meletakkan siswa sebagai subjek yang memiliki kesadaran, bukan sebagai objek (atau dapat diibartkan sebagai bejana yang terus menerus diisi). Kesadaran yang dimaksud disini terbagi dalam tiga tahap, yaitu kesadaran semi intransitif adalah ketidak mampuan masyarakat mengobjektifikasi fakta sehingga kenyataan hidup menjadi superealitas; kesadaran transitatif naif merupakan perkembangan kesadaran karena penindasan telah sampai pada titik klimaks sehingga muncul keinginan untuk melakukan perlawanan; kemudian yang terakhir adalah kesadaran transitif kritis merupakan kesadaran pada masyarakat sehingga mampu memandang secara kritis lingkungannya, memisahkan diri dari lingkungan yang menindas, kemudian melakukan tindakan untuk membebaskan diri (Freire, 6: 2008). Siswa diajari berkembang dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya sendiri. Sehingga ini dapat dikatakan sebagai usaha menghadirkan kesadaran dalam masyarakat, ketergantungan siswa terhadap guru pun lama kelamaan memudar. Selain itu siswa nantinya diharapkan dapat memahami secara kritis hubungan antara materi pelajaran dengan realitas sosial masyarakat yang terjadi. Sehingga muncul kesadaran transitif kritis dalam diri siswa. Namun praktiknya di lapangan, guru sama sekali tidak boleh mengajarkan pengetahuan atau dituntut untuk mengajarkan pengetahuan saat siswa ada yang bertanya. Ini kemudian yang meletakkan guru tidak sebagaimana mestinya. Tetap saja tidak ada dialog yang terjadi antara murid dan guru. Belum lagi kebijakan yang mewajibkan anak untuk naik kelas. Ini malah seolah menjadi alat represi sehingga tahap kesadaran tidak berjalan.

Namun penerapan Kurikulum 2013 yang serta merta tersebut masih belum sanggup mewujudkan cita-cita Freire di Indonesia. Keadaan sosial masyarakat Itali pada saat Freire memunculkan kesadaran disana dengan masyarakat Indonesia saat ini sangat berbeda. Pada saat itu, masyarakat Itali dapat dikatakan sangat tertinggal, sehingga pemilik modal saat itu merepresi kesadaran dengan cara membiarkan masyarakatnya menjadi muta aksara dan buta angka. Sedangkan dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini sangat berbeda. Kesenjangan masyarakat yang semakin parah setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia lebih cenderung mengedepankan sektor ekonomi daripada pendidikan. Ini kemudian yang memunculkan stikma bahwa perubahan kurikulum hanya dijadikan arena politik bagi yang berkepentingan. Kerancuan pelaksanaan memunculkan banyak spekulasi terhadap kurikulum baru ini. Spekulasi - spekulasi yang terjadi memunculkan wacana baru dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Dalam satu rezim wacana yang muncul sebagai wacana tandingan berubah kedudukan menjadi wacana relatif dalam rezim berikutnya.

Bertambah parah ketika dalam pelaksanaannya kurikulum ini menghilangkan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah menilaipengurangan mata pelajaran ini didasarkan pada kehidupan nyata anak usia sekolah dasar sudah mampu mengoprasikan computer maupun *handphone* dengan fasih. Namun hal ini dinilai sebagai kebijakan yang anti rakyat. Sebab anak-anak yang tinggal di pedesaan belum mampu mengoprasikan komputer maupun *handphone* dengan baik. Akibatnya, di masa depan kesenjangan sosial dalam masyarakat akan semakin jauh dan sifat kompetitif dari masyarakat akan semakin terasa.

Dari penjabaran yang sudah dilakukan diatas, polemik yang terjadi akibat perubahan Kurikulum 2013 ini bukan hanya menjadi polemik antar rezim melainkan sudah menjadi polemik masyarakat Indonesia pada umumnya. Penerapan kurikulum yang didasari oleh konsep Freireian dirasa masih belum tepat guna. Masyarakat masih perlu penyesuaian hingga kurikulum yang diterapkan ini sudah dapat dikatakan matang. Assement pun pada dasarnya memang perlu dilakukan untuk melihat kekurangan yang ada pada kurikulum yang sedang diterapkan. Jika perlu pembaruan harus dilakukan pembaruan, jika memerlukan penambahan ya harus

ditambah. Singkat kata pemerintah diharamkan tutup telinga dari suara-suara rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mukhrizal, dkk. 2014. *Pendidikan Posmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barker, Chris. 2011. *Cultural Studies : Teori & Praktik*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Budiono, dkk. 2013. *Forum Mangunwijaya VII: Menyambut Kurikulum 2013*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LkiS.
- Fakih, Mansur, Rom Topatimasang, dkk. 2001. *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo, Ivan Illich, Erich Fromm, dkk. 2009. *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis* (terj). Harry Wahyu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas* (terj). Imam Ahmad. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Rakhmat. 2013. *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Illich, Ivan, dkk. 2013. *Sekolah Dibubarkan, Lantas Mau Apa?: Pro dan Kontra Terhadap Pandangan Ivan Illich* (terj). Ign Gatut Saksiono. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Indawatik, R., Kartono, D. T., & Utami, T. (2018). Eksklusifitas Siswa (Studi Fenomenologi Konstruksi Sosial Pola Eksklusifitas Siswa pada Kelas Unggulan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1).
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mills, Sara. 2007. *Diskursus: Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial* (terj). Ali Noer Zaman. Jakarta: Penerbit Qalam.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, H.A.R, Riant Nugroho. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformasi untuk Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. 2015. *Pedagogik Teoretis Untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Wulandari, R. W., Soemanto, R. B., & Kartono, D. T. (2018). Pola Asuh Long Distance dalam Pembentukan Konsep Diri Remaja (Studi Diskriptif Tentang Pola Asuh Long Distance dalam Pembentukan Konsep Diri Remaja di SMAN 1 Girimarto, Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1).